

ANALISIS HARVARD PADA IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK

Kanthi Pamungkas Sari ¹⁾, Sri Margowati ²⁾

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang

² Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Magelang

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauhmana responsivitas masyarakat dalam implementasi dan pengembangan program Magelang Kota Layak Anak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi peta yang tepat dan kompleks tentang sejauh mana keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam program Kota Layak Anak dengan indikator: profil kegiatan; akses kegiatan dan kontrol atas sumber daya dan keuntungan yang diperoleh; faktor-faktor yang mempengaruhi; dan analisis program yang telah dilakukan masyarakat. Kota Layak Anak bertujuan agar dapat memberikan perlindungan sebagai aset masa depan bangsa secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam termasuk FGD. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis Harvard. Penelitian dilaksanakan di Kota Magelang dengan mengambil dua kecamatan yaitu Kecamatan Magelang Selatan dan Kecamatan Magelang Tengah. Adapun subyek penelitian adalah perwakilan dari organisasi sosial, organisasi keagamaan yang ada di wilayah penelitian, dan informannya adalah pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) program Magelang KLA sudah berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang dilakukan. Jika ditinjau dari aspek gender tidak nampak ada ketimpangan yang berarti, namun terdapat permasalahan yaitu pekerja anak dan anak yang bekerja dengan jam kerja tinggi menurut usianya, 2) masyarakat antusias dengan program KLA. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan KLA masih merasakan bersifat top down, belum bersifat bottom up, dan masih menganggap kegiatan KLA hanya bersifat fisik administrasi saja belum pada bersifat strategis

Keywords: *Analisis Harvard, Kota Layak Anak*

PENDAHULUAN

Peningkatan akses semua anak terhadap Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu strategi dalam upaya perlindungan anak. Pencanangan KLA didasarkan pada Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Implementasi perundangan tersebut mengindikasikan bahwa program KLA merupakan sebuah keharusan atau daya paksa pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan perlindungan terhadap anak. Sampai dengan periode 2009-2014 di Indonesia baru 34 provinsi dan

kota atau kabupaten yang berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari publik sebagai KLA.

Pencanangan tersebut untuk Kota Magelang sudah diwacanakan sejak tahun 2008 yang diupayakan melalui berbagai aktivitas. Akhirnya pada tahun 2012 mendapatkan penghargaan Magelang KLA tingkat Madya. Namun saat ini pelaksanaan kegiatan untuk kota layak anak masih lebih bersifat administratif. Masih diperlukan perluasan peran bukan hanya pemerintah daerah saja yang berkiprah tapi semua pihak pemangku kepentingan termasuk masyarakat secara luas. Dan terkait dengan evaluasi implementasi dan pengembangan program KLA belum pernah dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang valid. Analisis Harvard salah satu yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi tentang responsivitas masyarakat dalam implementasi dan pengembangan program terhadap Magelang KLA.

KAJIAN LITERATUR

1. Responsivitas Masyarakat

Responsivitas adalah kualitas yang responsif, bereaksi dengan cepat, sebagai kualitas orang, melibatkan emosi untuk menanggapi dengan orang dan peristiwa. Sedangkan menurut (Kristianto, 2014) bahwa responsivitas adalah persepsi dan harapan organisasi mengenai kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas pilihan dan mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi.

Respon memiliki beberapa jenis atau beberapa tipe, yaitu respon verbal dan non-verbal. Sedangkan kategori respon ada 3 kategori, yaitu respon kognitif, respon afektif dan respon psikomotor. Model *theory of reasoned action* yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein menjelaskan respon psikomotor ditentukan tidak saja oleh sikap individu, tetapi juga oleh norma subyektif yang ada dan dijelaskan oleh model teori Kurt Lewin bahwa respon perilaku merupakan fungsi dari kepribadian individual dan lingkungan (Azwar, 1999).

Jika kita menghendaki dapat memahami keadaan masyarakat atau memahami potensi dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat maka terlebih dahulu harus melihat secara obyektif keadaan masyarakat secara holistik. Menurut Peter L. Berger masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya

(Soekamto, 2004). Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan.

Selanjutnya menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggotanya (Soekamto, 2004). Rosenberg dan Hovlan dalam Azwar (1999) melakukan analisis terhadap berbagai respons. Respons reaksi kognitif verbal merupakan pernyataan mengenai apa yang dipercayai atau diyakini mengenai obyek sikap. Seseorang dapat diketahui sikap positif karena seseorang tersebut menyatakan bahwa ia percaya bahwa program dan pengembangan KLA akan dapat mewujudkan kehidupan anak-anak yang lebih baik. Respons kognitif yang non-verbal lebih sulit untuk diungkap, informasi tentang sikap yang diberikannya bersifat tidak langsung. Untuk memahami bagaimana sikap masyarakat, perlu untuk memperhatikan reaksinya terhadap publikasi, sosialisasi mengenai kebijakan, manfaat, fungsi serta peranan setiap pemangku kepentingan bagi pengembangan KLA.

Respons afektif verbal dapat dilihat pada pernyataan verbal perasaan mengenai sesuatu. Jika seseorang memberikan komentar positif terhadap implementasi dan pengembangan program KLA (misalnya gembira dengan adanya pembebasan biaya akte kelahiran), maka dapat diartikan bahwa sangat mungkin sikapnya terhadap pembebasan biaya akte kelahiran adalah positif. Respons afektif non-verbal berupa reaksi fisik seperti ekspresi muka yang mencibir, tersenyum, gerakan tangan dan lain sebagainya, yang dapat menjadi indikasi perasaan seseorang apabila dihadapkan pada obyek sikap.

Respons konatif (psikomotor) pada dasarnya merupakan kecenderungan untuk berbuat. Dalam bentuk verbal, intensi ini terungkap lewat pernyataan keinginan melakukan atau kecenderungan untuk melakukan. Sedangkan respons konatif non-verbal dapat berupa ajakan kepada orang lain untuk ikut dalam program KLA. Sikap seharusnya dipandang sebagai suatu predisposisi untuk berperilaku (memunculkan respons konatif) yang akan tampak aktual hanya bila kesempatan untuk menyatakannya terbuka luas. Walaupun tanpa dinyatakan dalam bentuk perilaku maka sikap akan kehilangan maknanya, tapi bukan berarti bahwa sikap tidaklain sekedar merupakan suatu konsistensi respons individual sebagai probabilitas terulangnya perilaku yang sama dalam situasi yang serupa. Hal ini dikarenakan

tindakan nyata tidak hanya ditentukan oleh sikap semata, akan tetapi juga ditentukan oleh kondisi eksternal lainnya. Disamping itu, ternyata untuk satu macam tindakan saja terdapat banyak pola sikap yang relevan. Karena itu ketidakharmonisan sikap lebih merupakan masalah orientasi individu terhadap situasi yang ada.

2. Gender dan Model Analisis Gender

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, persifatan, kedudukan, tanggung jawab dan hak perilaku, baik perempuan, maupun laki-laki yang dibentuk, dibuat, dan disosialisasikan oleh norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat setempat. Dalam kaitan ini, konsep gender berhubungan dengan peran dan tugas yang pantas/tidak pantas, baik untuk laki-laki, maupun perempuan.

Ada dua kelompok yang mendefinisikan gender secara berbeda. Kelompok pertama adalah sekelompok feminis yang mengatakan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak menyebabkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tataran sosial. Kelompok kedua menganggap bahwa perbedaan jenis kelamin akan menyebabkan perbedaan perlakuan atau peran berdasarkan gender. Misalnya, ada perlakuan khusus pada pekerja wanita karena kondisi biologisnya, seperti cuti hamil, cuti haid, pemberian jam kerja malam, dan sebagainya. (Puspitawati, 2007)

Jika ada yang memahami gender dalam konsep perbedaan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Hal ini memang tidak salah, karena dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008) gender adalah jenis kelamin. Namun yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah gender yang dimaknakan sebagai konstruksi sosio kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Meski jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan dengan gender feminin, namun kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukan merupakan korelasi absolut. Misalnya urusan publik selalu berhubungan dengan laki-laki. Sedangkan urusan domestik menjadi tanggungjawab perempuan saja.

Selanjutnya konsep analisis gender dalam pembangunan secara berkesinambungan dimulai dari pembahasan perempuan dalam pembangunan menuju gender dan pembangunan; peran ganda gender (pembagian gender pekerja, tanggungjawab, sumber daya dan hubungan gender), pembagian data (rumah tangga, tempat kerja dan komunitas), berdasarkan gender kerangka kerja analisis gender,

pendekatan perencanaan gender (peran gender, kebutuhan praktis dan strategis gender, serta pendekatan kebijakan menyeluruh) kerangka kerja dan kepedulian gender untuk mempromosikan sensitivitas dan memberdayakan perempuan, menggunakan perspektif gender dalam mengembangkan kebijakan dan daur pengelolaan proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi (Handayani dan Sugiarti, 2009).

Menurut Handayani dan Sugiarti (2009), beberapa model analisis gender yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi program di masyarakat antara lain:

- a. Teknik Analisis Harvard
- b. Teknik Analisis Moser
- c. Teknik Analisis Longwe
- d. Teknik Analisis Munro
- e. Teknik *Capacities and Vulnerabilities Analysis (CVA)*
- f. Matriks Analisis Gender (*Gender Analysis Matrix GAM*)
- g. Matrik Kerangka Kerja Logik (*The Logical Framework Matrix Longframe*)
- h. Konsep SEAGA
- i. Kerangka Analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)*

Dalam penelitian ini akan menggunakan salah satu teknik yang sesuai dengan tujuan dan kondisi dari pelaksanaan program.

3. Kota / Kabupaten Layak Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 Undang-Undang Pengadilan Anak: Anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal yang dapat disidangkan dalam pengadilan anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin. Seiring dengan penjelasan di atas menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPA RI) Nomor 11 tahun 2011 tentang Indikator KLA. Kabupaten/kota layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah

kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Artinya:

- a. Memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat baik secara pribadi maupun terwakilkan, terkait dengan kebijakan pengembangan daerah, fasilitas dan pelayanan kota/kabupaten
- b. Mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas sosial lainnya.
- c. Menerima pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.
- d. Memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan sarana kabupaten/ kota yang berkualitas (sarana air bersih, ruang bermain, jalur sekolah) - persyaratan keselamatan; persyaratan kesehatan; persyaratan kemudahan; dan persyaratan kenyamanan
- e. Setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama,kekayaan, gender, dan kecacatan.

Guna mencapai apa yang diharapkan dalam undang-undang tersebut, setiap kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PPA RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator KLA pasal 5 ayat (2), meliputi: (a) penguatan kelembagaan dan (b) klaster hak anak. Penguatan kelembagaan yang dimaksud adalah:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;

- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Maksudnya adalah melakukan penelitian dengan menggali semua informasi data di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kota Magelang, yaitu di Kecamatan Magelang Selatan dan Kecamatan Magelang Tengah. Perubahan yang diamati dan diukur dalam penelitian ini adalah responsivitas masyarakat dalam implementasi dan pengembangan Magelang KLA.

Teknik pengambilan data melalui observasi, dokumentasi wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan triangulasi data.

Adapun tahap penelitian adalah sebagai berikut:



HASIL PENELITIAN

1. Profil Aktifitas

Pada tahap kedua peneliti menyusun Profil Aktifitas Anak tentang aktifitas produksi (publik) dan aktifitas reproduksi. Dari hasil FGD bersama subyek penelitian didapatkan hasil sebagai berikut :

a. Aktifitas Produksi (Publik)

Pada aktifitas produksi tidak ada perbedaan antara profil aktifitas anak perempuan dan profil anak laki-laki.

1) Pekerja anak

- a) Meski jumlahnya tidak banyak namun pekerja anak ditemukan di beberapa kelurahan di wilayah Magelang. Mereka kebanyakan dari kelompok masyarakat pendatang dan bermukim di wilayah Kota Magelang
- b) Sampai saat ini belum ada data yang valid terkait dengan jumlah pekerja anak karena mereka memiliki pekerjaan yang tidak tetap dan cenderung tertutup dengan lingkungan masyarakat jika dimintai keterangan tentang

pekerjaannya. Namun dapat diidentifikasi mereka bekerja sebagai pedagang asongan, pengamen, dan pengemis.

- c) Penghasilan mereka tidak tetap, berkisar antara Rp. 10.000 - Rp. 20.000. Sebagian dari penghasilan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena mereka berasal dari keluarga kurang mampu dan sebagian besar bermasalah dengan eksistensi bapak sebagai kepala keluarga (contoh: bapaknya pengangguran, pergi tidak menafkahi keluarga)
- d) Sebagian besar tidak lulus SD. Jika ia berstatus sekolah, pada praktik akademiknya tidak dilaksanakan dengan baik
- e) Masyarakat maupun lingkungan belum bisa berbuat banyak untuk membantu pekerja anak, dan belum mengenal program layak anak yang sesungguhnya

2) Anak yang bekerja

- a) Anak yang bekerja jumlahnya lebih banyak ditemukan di beberapa kelurahan terutama di Kelurahan Magersari, Tidar Utara, Tidar Selatan, Rejowinangun Selatan, Rejowinangun Selatan. Namun belum memiliki data jumlah anak yang bekerja, nama dan alamat yang valid.
- b) Mereka bekerja setelah sekolah, untuk beberapa waktu (2-5 jam per harinya). Anak-anak berkerja membantu orang tuanya sebagai pemulung, pedagang kaki lima, ada yang diberi gaji dan ada yang tidak digaji oleh orangtuanya. Selain itu ada yang bekerja di UMKM dengan penghasilan disesuaikan dengan jumlah barang yang produksi dan tingkat resiko kerja (Rp. 2.000 – Rp. 10.000). Mereka berasal dari keluarga tidak mampu
- c) Rata-rata tingkat pendidikannya adalah SMP dan sampai saat ini masih tetap sekolah. Meskipun prestasi belajar mereka tidak begitu baik.

b. Aktifitas Reproduksi (Domestik)

Hasil FGD tentang aktifitas reproduksi yang dilakukan dengan subyek penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Aktifitas Reproduksi

No	Aktifitas	Anak P	Anak L
1	Membantu mengambil air	ya	ya
2	Membantu membeli minyak/gas	ya	ya
3	Membantu menyiapkan makanan	ya	Kadang-kadang
4	Menjaga adik/anggota keluarga yang sakit	ya	Kadang-kadang
5	Membantu membersihkan rumah	ya	ya
6	Membantu memperbaiki rumah	ya	ya
7	Membantu belanja/jual di/ke Pasar	ya	ya

Secara umum pada aktifitas reproduksi, antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak memiliki perbedaan yang berarti. Pada aktifitas membantu menyiapkan makanan dan menjaga adik/anggota keluarga yang sakit bagi anak laki-laki hanya dilakukan kadang-kadang, karena selama masih ada anggota keluarga yang perempuan maka aktifitas tersebut tidak akan dilakukan oleh anak laki-laki.

c. Aktifitas Sosial

Pada cakupan aktifitas social, dibatasi tiga aktifitas yang paling sering dilakukan oleh anak-anak yaitu aktifitas bermain, aktifitas olah raga dan aktifitas berorganisasi. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Aktifitas Sosial

Aktifitas	Anak P	Anak L	Keterangan
Bermain	Ya	Ya	Mayoritas mereka akan berkelompok dalam kegiatan bermain sesuai kelompok jenis kelamin.
Olah raga	Ya	Ya	Olah raga yang sering diikuti oleh perempuan volley dan badminton. Olah raga yang sering diikuti oleh laki-laki volley, badminton dan sepak bola
organisasi	Ya	Ya	Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berorganisasi. Karang taruna didirikan namun banyak yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk struktur organisasi memiliki kekhasan yang masih bersifat paternalistic.

2. Profil Akses dan Kontrol

Pada masyarakat Kota Magelang mayoritas sudah tidak membedakan antara hak akses dan kontrol antara anak perempuan dan anak laki-laki. Ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak anak tidak lagi menggunakan pertimbangan aspek gender. Antara anak perempuan dan laki-laki sudah diberikan hak yang sama.

Pertimbangan yang lebih mereka kedepankan adalah kemampuan dalam menyediakan sumber daya. Dalam tataran realitas aspek kemampuan atau kepemilikan atas sumber daya lebih mereka kedepankan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Berdasarkan hasil luaran yang diperoleh pada FGD sebelumnya, masalah yang paling urgen terkait Program Magelang KLA adalah

a. Norma-norma sosial yang berlaku

Hambatan (*constraints*) yang terjadi: adanya keinginan untuk mendapatkan hak anak dalam berbagai aspek kehidupan namun ada tanggung jawab sebagai anak untuk membantu orangtua secara maksimal. Jika tidak dilakukan maka ada beban moral spiritualitas yang akan mengganggu pikiran dan perasaannya. Perasaan kasihan terhadap orangtua atas tuntutan pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi pertimbangan utama bagi mereka. Hal ini mengakibatkan waktu yang dimiliki untuk belajar, bermain dan beraktifitas sosial lainnya menjadi sangat terbatas. Pekerja anak atau anak yang bekerja memiliki kecenderungan tertutup (*introvert*) dengan dunia anak yang sebayanya.

Kesempatan (*opportunities*) yang ada: adanya program Kota Layak Anak dari pemerintah daerah yang memiliki kegiatan-kegiatan diantaranya Forum Anak dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota; program GNOTA; pelatihan ketrampilan-ketrampilan yang kreatif yang dapat menambah penghasilan keluarga dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang layak. Selain itu masih ada rasa solidaritas sosial yang terus dibangun dalam masyarakat. Misalnya dalam bentuk dasawisma, PKK, PKR dan sebagainya yang bisa digunakan sebagai wadah peningkatan pemenuhan hak anak.

b. Struktur kelembagaan

Hambatan (*constraints*) yang terjadi : kegiatan Kota Layak Anak lebih banyak terfokus pada program *topdown*, sehingga permasalahan di lapangan menjadi kurang maksimal dalam penyelesaiannya karena lebih banyak bersifat administratif. Kecamatan Ramah Anak, Kelurahan Ramah Anak belum sepenuhnya bisa dipahami oleh sebagian masyarakat Kota Magelang. Ada Surat Keputusan atau ada Forum yang melindungi anak dari tindak kekerasan namun kegiatannya masih belum jalan sebagaimana yang diharapkan

Kesempatan (*opportunities*) yang ada: program Kota Magelang Layak Anak dapat dilaksanakan secara inheren dengan melibatkan semua SKPD dan seluruh pemangku kepentingan yang ada.

c. Faktor ekonomi

Hambatan (*constraints*): dari aspek gender sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan profil aktifitas maupun profil akses dan kontrol, namun dari aspek perlindungan anak masih ada hambatan yang berarti, yaitu pekerja anak. Semua pekerja anak tidak mendapatkan atau tidak menggunakan hak mendapatkan pendidikan disebabkan karena faktor ekonomi keluarga. Demikian pula bagi anak yang bekerja, dengan jam kerja sampai dengan 5 jam. Bisa dilogikakan, jika anak pulang sekolah jam 14.00 atau 15.00, kemudian pulang sekolah harus bekerja membantu di UMKM atau lainnya maka ia akan berhenti beraktifitas produktif sampai dengan jam 19.00 atau 20.00 maka ia bisa pulang dalam keadaan sangat letih dan tidak sempat belajar maupun beraktifitas social lainnya.

Kesempatan (*opportunities*) yang ada: UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; dan ini merupakan tanggung jawab orangtua dan pemerintah.

SIMPULAN

1. Dengan menggunakan analisis Harvard, program Magelang KLA yang menjadi program pemerintah daerah sudah berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang dilakukan. Jika ditinjau dari aspek gender nampak tidak ada ketimpangan yang berarti, namun terdapat permasalahan yang seharusnya tidak muncul yaitu pekerja anak dan anak yang bekerja dengan jam kerja tinggi menurut usianya.
2. Masyarakat merespons positif semua program KLA dari pemerintah daerah. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan KLA, masyarakat masih merasakan bersifat *top down*, belum bersifat *bottom up*. Sehingga pada tataran realitas sosial banyak yang kurang teradopsi sebagai program kegiatan bersama-sama dan masih menganggap kegiatan KLA hanya bersifat fisik administrasi saja belum pada bersifat strategis

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 1998. Sikap Manusia “Teori dan Pengukurannya” Edisi Kedua. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Handayani & Sugiarti. 2009. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Edisi Revisi. Malang: UMM Press
- Kristianto, A. (2014, December). Kinerja Organisasi dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. *Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1-16.
- Puspitawati. 2007. Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan dalam Menyongsong Era Globalisasi, Prosiding dalam Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Menuju Kualitas Kehidupan Berkelanjutan (Kerjasama Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2007)
- Tim Penyusun. 2008. Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak